

## ANALISIS POTENSI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERHADAP PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Yulius Yohanes<sup>1)</sup>, Stephanie Ines Mayrisa<sup>2)</sup>, Virga Tiyana<sup>3)</sup>, Ade Putri Indriyanti<sup>4)</sup>,  
Putri Novianti Lestari<sup>5)</sup>, Murnia Nur Fatimah<sup>6)</sup>

Ilmu Pemerintahan, Universitas Tanjungpura, Pontianak

### Correspondence

Email: [yulius.yohanes@fisip.untan.ac.id](mailto:yulius.yohanes@fisip.untan.ac.id)

No. Telp:

Submitted 28 April 2024

Accepted 4 Mei 2024

Published 5 Mei 2024

### ABSTRACT

*The capital city of a country is an important part of a country's government, this of course applies to every country, one of which is Indonesia. At the 2022 DPR RI plenary meeting, the government agreed to a plan to move the Indonesian capital (IKN) from the capital DKI Jakarta to East Kalimantan Province. The relocation of the capital city was motivated by the heavy burden on DKI Jakarta as the center of Indonesian government and the reduction in economic inequality with other islands. East Kalimantan Province was chosen as the capital because the region was considered ready from various aspects, but there was also the opposite opinion which said that the IKN move was not completely ready. The pros and cons of moving the capital certainly receive many different opinions from various parties. Therefore, the purpose of writing this journal is to see what potential or advantages the East Kalimantan region has for the development of the Indonesian capital city (IKN).*

**Keywords:** Government Role; IKN; Regional Potential

### ABSTRAK

Ibu kota suatu negara merupakan bagian penting dalam pemerintahan suatu negara, hal ini tentunya berlaku di setiap negara, salah satunya Indonesia. Pada rapat paripurna DPR RI 2022, pemerintah menyetujui rencana pemindahan ibu kota negara nusantara (IKN) dari Ibu Kota DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota dilatarbelakangi oleh beratnya beban DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia dan berkurangnya ketimpangan ekonomi dengan pulau lain. Dipilihnya Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota karena daerahnya dinilai sudah siap dari berbagai aspek, namun ada juga pendapat sebaliknya yang mengatakan bahwa perpindahan IKN belum sepenuhnya siap. Pro dan kontra pemindahan ibu kota tentunya mendapat banyak pendapat berbeda dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk melihat apa saja potensi atau keunggulan wilayah Kalimantan Timur terhadap pembangunan ibu kota Nusantara (IKN).

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah; IKN; Potensi Wilayah

### Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara republik dengan pulau terbanyak didunia yaitu 13.487 pulau dengan populasi penduduk Indonesia berdasarkan data dari PBB sekitar 279.424.421 jiwa per kamis 2 Mei 2024. Negara Indonesia memiliki daratan seluas 1.811.569 km<sup>2</sup> dan wilayah perairan dengan 93.000 km<sup>2</sup>. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai keunggulan dan dapat dinilai sebagai wilayah yang strategis karena termasuk negara kepulauan terbesar, memiliki sumber daya alam yang melimpah, beriklim tropis dan didukung oleh pergantian musim yang tidak terlalu ekstrem. Selain keunggulan wilayahnya, banyaknya suku bangsa dengan keragaman pola pikir, agama, seni pengetahuan, bahasa, tradisi budaya lokal bahkan masyarakat yang berkarakteristik unik dan berbeda tentunya membuat Indonesia mempunyai potensi besar untuk terus berkembang menjai negara maju yang lebih baik

Dengan wilayah dan keberagaman sebesar itu, pemerintahan Indonesia juga menjadi sorotan yang penting, hal ini dapat dilihat dari Ibu Kota sebagai pusat seluruh sektor negara itu sendiri. Hal ini berarti bahwa Ibukota sebuah negara adalah sebuah objek vital yang menjadi pusat pemerintahan sebuah Negara dengan fungsi sebagai pusat-pusat unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, serta yudikatif suatu negara. Pada tanggal 31 Agustus 1964, Presiden Soekarno secara resmi menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara, sesuai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964. Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, kebutuhan tenaga kerja yang terpusat di ibu kota menjadikan wilayah Jakarta mengalami lonjakan penduduk yang meningkat drastis. Selain itu, pembangunan proyek besar berupa pembangunan pemukiman masyarakat ataupun pengembangan pusat bisnis kota juga mulai ikut serta dilaksanakan.

Padahal, perpindahan ibu kota negara sudah direncanakan sejak lama, yakni pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya pada tahun 1950-an. Ia pun mengutarakan pendapatnya ingin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah, tepatnya ke Kota Palangkaraya. Saat itu, ia memperkirakan Jakarta akan tumbuh tak terkendali. Palangkaraya menjadi ibu kota Soekarno karena beberapa alasan. Pertama, Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia dan terletak di pusat kepulauan Indonesia. Kedua, menghilangkan sentralisme Jawa. Ketiga, Soekarno bermaksud mendirikan ibu kota baru berdasarkan gagasannya sendiri karena menurutnya pembangunan Jakarta dan Jawa didasari pada konsep warisan kolonial Belanda.

Pada Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengatur rencana pemindahan ibu kota Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan letak lokasi di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di dua kabupaten yang dipilih sebagai ibu kota baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian program ini dibahas dan disetujui pada awal 2022 pada sidang paripurna DPR RI dan sekarang sudah dimulai proses pembangunan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemilihan wilayah Kalimantan timur sebagai ibu kota negara (IKN) ini tentunya berdasarkan pertimbangan dari kelebihan atau keunggulan potensi di wilayah itu sendiri baik dari sektor ekonomi, pembangunan, dan lain-lain.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian. (Sarwono 2006) mengatakan bahwa penelitian kepustakaan juga dapat menggali lebih banyak buku, memverifikasi data dan temuan penelitian sebelumnya, sehingga memberikan landasan teori terhadap masalah yang diteliti. Sumber data penelitian ini berasal dari penelitian-penelitian terdahulu dimana pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk mengamati perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Subjek penelitian ini adalah potensi wilayah Kalimantan Timur dalam pengembangan IKN. Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Tugas penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban atas permasalahan, menawarkan alternatif pemecahannya.

### **Pembahasan**

Ketika memberitakan tentang pemindahan ibu kota, tidak sedikit negara yang telah melaksanakan agenda ini sepanjang sejarah, baik itu karena alasan perang, perubahan kedudukan geopolitik atau bahkan dinamika politik internal. Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan pemindahan ibu kota yang terjadi antara tahun 1946 hingga 1960. Saat itu Jakarta berpindah ke Yogyakarta dan kemudian pindah ke Bukittinggi sebelum akhirnya pindah ke Jakarta. Perpindahan tersebut sebagian besar dilatar belakangi oleh isu-isu terkait dengan kedudukan negara yang mengakibatkan keputusan yang mendesak untuk melakukan pemindahan. Namun, wacana pemindahan ibu kota Indonesia secara resmi telah dipertimbangkan jauh sebelumnya, terutama sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1957. Pada saat itu, ibu kota negara yang diusulkan adalah Palangkaraya di Kalimantan Tengah dengan alasan letaknya yang strategis di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Kemudian pada tahun 1997, Presiden Soeharto juga mengusulkan pemindahan ibu kota ke

Jongol, Jawa Barat. Selanjutnya, ditahun 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk tim khusus untuk mempelajari kemungkinan pemindahan ibu kota, meskipun rencana tersebut belum terealisasi.

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo merealisasikan pemindahan ibu kota (IKN) pada bulan agustus 2019 ketika dia mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, kesepakatan ini diumumkan setelah Pemerintah dan DPR RI menyetujui rencana tersebut pada sidang paripurna. Selanjutnya proses pengembangan dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara telah dimulai setelah pengumuman tersebut.

Terpilinya Kalimantan Timur menjadi ibu kota Indonesia yang baru meliputi kabupaten penajam paser utara dan kabupaten kutai kartanegara, pemilihan lokasi ini didasari oleh aksesibilitas yang baik, dekat dengan kota Balikpapan dan Samarindra yang merupakan 2 kota besar yang ada, keberagaman populasi atau penduduk yang terbuka, minimnya potensi terjadinya konflik serta dukungan pertahanan dari tiga cabang angkatan yaitu darat, laut dan udara. Selain itu, infrastruktur utama yang lengkap termasuk bandara dan pelabuhan, serta ketersediaan air yang baik. Transportasi Sungai di Kalimantan Timur juga sangat memiliki peminat yang tinggi. Transportasi ini berpusat di Sungai Mahakam hingga ke hulu yang menghubungkan daerah pantai Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong hingga pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat. Selain Sungai Mahakam, transportasi sungai di Kalimantan Timur juga berada di sungai Sangatta, sungai Bengalon, sungai Kandilo, dan sungai Telake.

Pemindahan ibu kota negara juga memberikan dampak negatif dan positif bagi Indonesia.

#### **A. Adapun dampak positif dari pemindahan Ibu Kota Negara di antaranya yaitu:**

##### **1. Meningkatkan perekonomian nasional**

Dampak positif dari pemindahan ibu kota dalam segi ekonomi salah satunya adalah dapat menggali potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. pemindahan ibu kota negara juga berdampak pada pembangunan yang merata di wilayah Indonesia tidak hanya di pulau Jawa saja sehingga kegiatan ekonomi tidak berpusat dan berkembang di daerah Jawa namun juga diseluruh wilayah di Indonesia.

Akibat dari pemindahan ibukota akan terjadi kesenjangan antar kelompok yang membuat indikasi dan pendapatan menjadi menyempit. Pemindahan ibukota ini akan menyebabkan perekonomian menjadi lebih terdiversifikasi ke sektor-sektor yang lebih padat, yang akan mengakibatkan penurunan kesenjangan antar kelompok-kelompok di tingkat regional maupun nasional yang telah dikategorikan baik.

Ketiga, pemindahan ibukota ini akan menyebabkan bertambahnya inflasi rasional sebesar 0,3% minimal dari basis poinnya dan pemindahan ibukota ini menyebabkan beberapa tekanan dari berbagai sisi permintaan. Dampak dari inflasi di provinsi yang akan di jadikan ibukota negara ini akan menjadi sangat minim jika provinsinya memiliki persiapan infrastruktur yang lebih baik dan sektor-sektor produksi yang relatif beragam. Selanjutnya, pemindahan ibukota negara ke luar pulau Jawa yang akan mendorong di berbagai bidang terutama di bidang perdagangan di dalam ibukota provinsi yang baru. Jika hal tersebut terjadi akan memungkinkan semakin berkebangnya hal-hal baru yang memiliki konektivitas antar provinsi lain semakin membaik. Pemindahan ibukota juga menciptakan dorongan investasi yang lebih luas daripada wilayah-wilayah yang lainnya serta meningkatkan output dari berbagai sektor-sektor non-tradisional.

## 2. Pemerataan pembangunan di wilayah luar Pulau Jawa

Salah satu tujuan pembangunan IKN yang berada di luar pulau Jawa ialah untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah. Kesenjangan yang dimaksud ialah dalam segi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Sebagaimana yang kita tau bahwa pembangunan infrastruktur di pulau Jawa sangat berbanding terbalik dengan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau lainnya. Tingkat pembangunan untuk wilayah di luar pulau Jawa tidak mengalami peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya.

Ketimpangan pembangunan ini tentu akan berdampak di sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dampak positif dari pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini akan memberikan potensi pembangunan yang merata bagi wilayah luar pulau Jawa. Dengan begitu, seluruh sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat di Jawa dan luar Jawa tidak beda jauh.

## 3. Mengurangi kepadatan masyarakat di Jakarta

Setiap tahunnya, tingkat kepadatan masyarakat di Jakarta selalu mengalami peningkatan. Hal ini turut menjadi penyebab dari kemacetan Jakarta setiap harinya. Pasalnya, sektor pemerintahan dan sektor bisnis/industri tingkat nasional berpusat di Jakarta. Adanya pemindahan IKN ini tentu akan mengurangi tingkat kepadatan masyarakat. Nantinya, sektor bisnis/industri bisa berpusat di Jakarta dan sektor Pemerintahan di Kalimantan Timur.

### B. Dampak negatif dari pemindahan Ibu Kota Negara di antaranya yaitu:

#### 1. Berisiko merusak lingkungan hidup

Seperti yang diketahui bersama bahwa Kalimantan Timur masih memiliki lingkungan yang sangat alami. Banyak flora dan fauna yang mendiami sejumlah hutan di wilayah Kaltim ini. Ketika proses pembangunan IKN berlangsung, tentu akan mengurangi jumlah hutan yang ada di wilayah Kaltim. Hal ini sangatlah mengganggu kestabilan ekosistem yang ada di hutan tersebut dan berisiko terjadinya bencana alam. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen PKTL KLHK Herban Heryandana menuturkan total luas hutan yang akan dilepas untuk wilayah IKN ini mencapai 36.873 hektare. Besarnya pelepasan hutan ini akan sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup flora dan fauna di wilayah itu. Kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kaltim ini menjadi momok yang sudah jelas di depan mata.

#### 2. Membengkakan nilai APBN

Dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk menyelesaikan pemindahan IKN ini. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa proyek pemindahan IKN ini akan menghabiskan anggaran mencapai Rp501 triliun. Tentunya, besaran biaya tersebut akan membuat APBN meningkat tajam. Dan menyebabkan jumlah hutang pemerintah semakin besar. Pengembangan IKN dimulai pada tahun 2022 dan direncanakan hingga tahun 2045 dalam periode perencanaan jangka panjang. Proses ini terbagi menjadi lima tahap utama yaitu:

- a. Tahap pertama pada tahun 2022-2024
- b. Tahap kedua pada tahun 2025-2029
- c. Tahap ketiga pada tahun 2030-2034
- d. Tahap keempat pada tahun 2035-2039
- e. Tahap kelima pada tahun 2040-2045

Pelaksanaan program IKN melibatkan berbagai departemen dan lembaga pemerintah, antara lain Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Sekretariat Negara, Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian PANRB, BKN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian IKN, BUMN dan Sektor Publik. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (IKN), yang disetujui DPR pada 18 Januari 2022, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani UU IKN pada 15 Februari 2022. Lokasi baru IKN penting untuk mendorong pertumbuhan khususnya di wilayah Timur. Hal ini didukung oleh tingginya investasi dalam dan luar negeri di Kalimantan dan seluruh wilayah Indonesia bagian timur, seperti yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020. Pulau Kalimantan dilaporkan memberikan kontribusi sebesar 13,64% (Rp 52,7049 triliun) atau senilai 7,56 miliar dolar. dalam investasi perumahan. Rasio penanaman modal asing terhadap total penanaman modal dalam negeri pada tahun 2019 (\$2,131.4 miliar).

Tujuan relokasi IKN salah satunya adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, sehingga kegiatan perekonomian dapat tersebar di seluruh tanah air mulai dari Pulau Jawa hingga wilayah Indonesia lainnya. Konstruksi IKN merupakan dana RPJM 2020-2024 sebagai proyek pembangunan perkotaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp466 miliar untuk pembangunan swasta, persiapan, dukungan konstruksi dan relokasi serta dukungan pemerintah kepada IKN. Pemerintah menghimpun dana dari berbagai sumber termasuk APBN dan sumber hukum lainnya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan IKN sesuai dengan rencana induk IKN, antara lain:

- a. APBN dapat dialokasikan melalui anggaran belanja atau pembiayaan
- b. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam membantu pembangunan IKN dengan beberapa skema termasuk KPBU Tarif (User Payment) yang melibatkan pengembalian investasi dari pengguna dan KPBU availability payment yang melibatkan pembayaran ketersediaan layanan
- c. Skema partisipasi badan usaha yang bisa dimiliki oleh negara, termasuk BUMN atau Swasta dengan berbagai bentuk investasi dan penugasan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d. Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang melibatkan pemberian dana dari bilateral/lembaga multilateral untuk pengembangan IKN yang berkelanjutan termasuk melalui hibah dan pemberian dana talangan
- e. Skema pendanaan alternatif lainnya yaitu *croud funding* dan dana dari filantropi yang termasuk dalam *creative financing*.

Dana-dana tersebut dialokasikan pada program-program pembangunan infrastruktur utama dalam pembangunan IKN yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Pembangunan Istana Negara, Pangkalan Militer TNI/POLRI, pembebasan lahan dan prasarana dasar seperti jalur jalan termasuk gedung diplomatik, kawasan hijau dan pembangunan rumah dinas ASN/TNI/POLRI dengan sistem APBN langsung.
- b. Bangunan serta perlengkapan pokok yang tidak terpasang pada APBN, gedung dinas, gedung administrasi, gedung peradilan, dan gedung peradilan ASN/TNI.POLRI. Hal ini juga mencakup peningkatan konektivitas termasuk bandara, pelabuhan, jalan tol dan jalan raya, serta menyediakan fasilitas pendidikan, museum dan fasilitas medis. Proyek ini menggunakan pendekatan Kemitraan Pemerintah-Bisnis (KPBU).

- c. Pembangunan gedung-gedung pemerintah, perguruan tinggi, perguruan tinggi swasta, media dan teknologi, pusat kesehatan swasta, pusat perbelanjaan dan Kongres, Event, Kongres dan Pameran (MICE) termasuk program khusus dan program BUMN/D.

## Kesimpulan

Pengembangan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara (IKN) dilandasi oleh sejumlah kegiatan, antara lain upaya menekan pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa, meningkatkan pembangunan dan keadilan perekonomian, serta meningkatkan pelayanan pemerintahan agar tidak terbatas. ke Jawa. Pemilihan lokasi ini karena kemampuannya tergolong sebagai lokasi yang baik untuk ibu kota negara baru, serta akses yang baik, kedekatan dengan dua kota besar – Balikpapan dan Samarindra, serta jumlah penduduk yang beragam dan pikiran yang terbuka. Selain itu, infrastruktur dasar termasuk bandara dan pelabuhan serta ketersediaan air yang baik juga lengkap. Perkembangan tersebut jelas mempunyai dampak positif dan negatif, namun dampak negatif tersebut dapat dikurangi dengan arahan pemerintah berdasarkan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan kedepannya di kawasan perkotaan.

## Referensi

- Amalia, Siti, Aditya Agung Nugraha, Ahmad Sukron, and Farida Rohmah. 2023. "Analisis Dampak dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Sahmiyya*.
- Hasibuan, Reni Ria Armayani, and Siti Aisha. n.d. "Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia." *Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota* .
- Ramadhani, Rahmah, and Yusa Djuyandi. 2022. "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Resiko Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara." *Jurnal Politik, Keamanan, dan Hubungan Internasional* 144-152.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryadi Sanjaya, Chotib. 2022. "Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 155-168.
- Utomo, Deny Slamet Pribadi: Setiyo. 2021. "Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Persepektif Persaingan Usaha." *Jurnal Persaingan Usaha*.